

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil Penelitian dan pembahasan tentang Fungsi Pengawasan DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Terhadap Pemerintah Daerah Dalam Menangani Banjir Dikabupaten Hulu Sungai Tengah dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Fungsi Pengawasan DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Terhadap Pemerintah Daerah Dalam Menangani Bencana Banjir Dikabupaten Hulu Sungai Tengah, karena disebabkan keadaan darurat, maka pengawasan bencana banjir tidak bisa dilakukan dengan ketat dan maksimal, tetapi DPRD secara tidak langsung telah melakukan pengawasan, penganggaran, dan serap aspirasi sekaligus ketika bencana banjir Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada 2021, 2022, dan 2023 walaupun sedikit fungsi tersebut telah dilaksanakan, namun fungsi pengawasan sesuai peraturan DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 03 Tahun 2019 Tentang tata tertib DPRD dalam melakukan fungsi pengawasan belum sepenuhnya dilakukan oleh DPRD dan fungsi pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah berkaitan dengan banjir yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah masih kurang.
2. Adapun upaya terbesar yang telah dilakukan DPRD, dan jajaran pemerintah daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah ialah pembangunan kolam regulasi beserta rencana pembangunan bendungan. Kolam regulasi berfungsi

menampung air yang turun dari gunung dan ditampung supaya jangan sampai turun ke kota Barabai, adapun kendala yang dihadapi berupa adanya sungai yang belum dinormalisasi yaitu sungai batang alai dan sungai barabai dan kendala paling besar ialah keterbatasan dana anggaran. Upaya belum dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah yang diminta masyarakat adalah perbaikan saluran-saluran air dan masih adanya pengendapan lumpur di lahan pertanian, dengan demikian, untuk penanganan banjir kedepannya diharapkan maksimal.

B. Saran

1. Untuk DPRD, lebih memahami lagi tugas fungsi pengawasan yang melekat pada DPRD dan harus lebih memprioritaskan sinergitas dengan Pemerintah Daerah dalam pengawasan banjir yang berulang-ulang kali di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
2. Untuk Pemerintah Daerah, lebih serius lagi dalam menangani banjir yang mana permasalahan ini menjadi prioritas di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Meskipun kendala anggaran di Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah kurang, tetapi Pemerintah Daerah harus seminimal mungkin untuk menyelesaikan permasalahan di daerahnya.
3. Untuk Peneliti selanjutnya, disarankan mengambil penelitian mengenai, permasalahan penyebab bencana banjir di Daerah Hulu Sungai Tengah, karena dalam penelitian ini responden mengatakan penyebab bencana banjir ini salah satunya disebabkan oleh aktivitas penebangan liar yang kurang ditindak tegas.